

KONTEKS INTERNASIONAL PASCA-PERANG DUNIA II DAN LANGKAH AWAL PERJUANGAN DIPLOMASI RI

Oleh: **Adi Nusferadi**

Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ

Abstrak.

The international situation, immediately at the end of WW II, became the crucial consideration of the Indonesian's republic to choose diplomatic way as one of its strategy to defend its newly independence proclamation. The same situation was exactly putting the British force, the main body of Allied forces commissioned in Indonesia, in a big dilemma. She was trapped between her task to disarm and surrender Japanese troops and repatriated the APWI in Indonesia, and her agreement to support the Dutch effort reemerge its claimed possession of the Indonesian archipelago at the expense of her main task as Allied forces. Nevertheless, the dilemma experienced by the British and the opportunity opened to gain international acknowledgement of Indonesian's newly republic sovereignty, paved for Indonesian leaders the way to diplomatic arena, to face her enemy through the international community mediation.

Pengantar

Revolusi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa penting dengan berbagai aspek terkait di dalamnya. Sehingga gambaran kembali peristiwa tersebut dapat melibatkan berbagai interpretasi dan sudut pandang. Mengenai hal ini sejarawan Sartono Kartodirdjo mengungkapkan:

"...maka dari itu pada umumnya yang sangat menarik dari sejarah Revolusi Indonesia bukan saja fakta-fakta tentang peristiwa-peristiwanya, melainkan pandangan ataupun gambaran mengenai peristiwa-peristiwa itu".¹

¹ Sartono Kartodirdjo, "Wajah Revolusi Indonesia dipandang dari Perspektivisme Struktural", *Prisma*, no. 8, Agustus 1981, hlm. 3-13.

² S.L. Roy, *Diplomasi*, (Jakarta, 1991), hlm. 2.

Salah satu perspektif yang dapat dilakukan dalam membahas kembali Revolusi Indonesia adalah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi urgensi penerapan strategi diplomasi pada Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Pengertian diplomasi secara umum dapat dilihat pada ungkapan sebagai berikut:

"diplomasi sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar-negara, merupakan seni mengedapankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengijinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya".²

Hal yang tersirat dari ungkapan tersebut adalah pengejawantahan kepentingan negara yang bersangkutan dengan memperhitungkan situasi internasional yang mengelilinginya³.

Dengan tidak bermaksud mengabaikan perspektif lain, pembahasan tulisan ini menggunakan perspektif tentang bagaimana diplomasi beroleh tempat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikemukakan dengan pengungkapan bagaimana situasi internasional akhir PD II secara langsung mempengaruhi situasi Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Upaya untuk membuka jalur perjuangan diplomasi oleh RI tidak dapat diabaikan dari pengaruh situasi tersebut. Ini berarti membuka dan memperluas arena perjuangan kemerdekaan Indonesia, pada lingkup yang lebih luas. Status sebagai pelaku perundingan dengan keterlibatan negara-negara lain makin memperkuat posisi Indonesia untuk memperjuangkan pengakuan internasional.

Akhir Perang Dunia II dan Misi Inggris di Indonesia

Tanggal 26 Juli 1945 pada konferensi di Potsdam, Jerman, para pimpinan negara Sekutu dari Amerika Serikat, Inggris, dan Cina menandatangani deklarasi yang menyerukan agar Jepang menyerah dengan tanpa syarat. Namun deklarasi yang berisi tigabelas pasal ini baru dipenuhi oleh Jepang setelah negara tersebut dijatuhi dua bom atom, yaitu tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan tanggal 8 Agustus 1945 di Nagasaki.

³ *Ibid.*, hlm. 6.

Pada masa PD II wilayah komando Sekutu di Pasifik dibagi menjadi dua. Pertama, adalah wilayah yang meliputi Australia, Kepulauan Solomon, Kepulauan Bis-marck, dan Kepulauan Indonesia (kecuali Pulau Sumatera) yang menjadi tanggung jawab *South West Pacific Command* (SWPC) atau Komando Pasifik Barat Daya, dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dari Amerika Serikat⁴. Kedua, adalah wilayah yang meliputi Burma, Malaya, Srilanka, Thailand, Singapura, dan Sumatera yang menjadi tanggung jawab *South-East Asia Command* (SEAC) atau Komando Pasifik Asia Tenggara, dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten dari Inggris⁵.

Pada konferensi Sekutu di Potsdam terjadi pengalihan tugas penanganan daerah bekas pendudukan Jepang, termasuk pula kawasan di Indonesia⁶. Wilayah yang terletak di Indocina-Perancis (di selatan dari garis 16 derajat lintang utara) dan Indonesia, yang semula menjadi tanggung jawab SWPC dialihkan ke SEAC⁷. Pengalihan ini dilakukan agar SWPC lebih memiliki keleluasaan untuk melakukan penyerbuan dan pendudukan langsung

⁴ Oey Hong Lee, *War and Diplomacy in Indonesia 1945-1950*, (North Queensland: 1981), hlm 17. SWPC berdiri bulan April 1942.

⁵ *Ibid.*, SEAC dibentuk bulan Agustus 1943 pada konferensi yang dihadiri oleh Amerika Serikat dan Inggris di Quebec, Kanada. Semula markas besar SEAC berada di New Delhi, India. Kemudian dipindahkan ke Kandy, Srilanka. Dan ketika perang berakhir dipindahkan ke Singapura.

⁶ David Wehl, *The Birth of Indonesia*, (London, 1948, hlm. 31. pada deklarasi ini Indonesia disebut sebagai "Netherland East Indies".

⁷ F.S.V. Donnison, *British Military Administration in the Far East 1945-1946*, (London: 1956), hlm 417.

terhadap Jepang. Hanya daerah-daerah yang terdapat pada jalur penyerbuan menuju Jepang seperti kawasan ti-mur Indonesia seperti Irian, Morotai, Tarakan, Balikpapan yang akan langsung dibebaskan oleh SWPC dari pendudukan Jepang⁸.

Sebagai pimpinan SEAC, Laksamana Mountbatten keberatan menerima pengalihan atau penambahan wilayah tanggungjawab dari SWPC. Namun pada konferensi di Potsdam tersebut, Mountbatten mendapat tekanan dari PM Inggris, Winston Churchill, untuk mau menerima pengalihan tersebut. Mountbatten pun diberi informasi bahwa ada rencana penggunaan bom atom oleh Sekutu sehingga diperkirakan Jepang akan segera menyerah⁹. Laksamana Mountbatten menerima secara resmi pengalihan sebagian wilayah tanggungjawab dari SWPC pada tanggal 15 Agustus 1945, sehari setelah Kaisar Jepang, Hirohito, mendeklarasikan menyerahnya Jepang pada Sekutu.

Penambahan wilayah tanggungjawab SEAC, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, menjadi beban yang sangat besar terutama bagi Inggris. Tanpa tambahan daerah tanggungjawab pun SEAC memiliki keterbatasan dalam hal personil maupun peralatan. Penambahan daerah tanggungjawab SEAC dari SWPC berarti penambahan daerah seluas setengah juta mil persegi dengan populasi 80 juta jiwa¹⁰. SEAC harus melucuti dan memulangkan 750.000 serdadu Jepang, serta menolong 80.000

ta-wanan perang Sekutu yang tersebar di 250 kamp tawanan, serta lebih kurang 42.700 interniran sipil¹¹.

Mengingat keterbatasan SEAC, Laksamana Mountbatten mengemukakan rencana prioritas daerah yang akan terlebih dahulu didarati oleh pasukan SEAC. Rincian prioritas tersebut adalah sebagai berikut: Singapura pada tanggal 5 September, Hongkong pada tanggal 10 September, Siam pada tanggal 3 September, Port Sutttenham tanggal 9 September, Indocina-Perancis antara tanggal 11 hingga 19 September, dan Indonesia pada awal bulan Oktober¹².

Berdasarkan urutan prioritas pendaratan tentara Sekutu, maka Indonesia tidak berada pada urutan utama. Hal ini dapat diinterpretasikan, kawasan ini bukan prioritas pula bagi kepentingan Inggris, ditambah kenyataan keterbatasan sarana dan personil yang dimiliki SEAC. Guna mengantisipasi-pasi potensi akibat keterlambatan kehadiran pasukan Sekutu, maka pimpinan SEAC memerintahkan Marsekal Terauchi, Panglima Tentara Jepang di wilayah selatan, untuk bertanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban di kawasan Asia Tenggara hingga kedatangan tentara Sekutu.

Sementara selain harus memikul misi berat SEAC untuk menangani penyerahan Jepang, terdapat misi berat lain yang membebani Inggris yaitu membantu pemulihan kekuasaan Belanda dibekas wilayah jajahannya di Indonesia. Sebagai sesama negara Sekutu, Inggris terikat kesepakatan dengan Belanda untuk membantunya memulihkan kekuasaannya atas

⁸ *Ibid.*

⁹ Donnison, *Op. Cit.* hlm. 417.

¹⁰ Donnison, *Op. Cit.* ,hlm. 421.

¹¹ Oey Hong Lee, *Op. Cit.* hlm 19.

¹² *Ibid.*, hlm 24.

Indonesia yang pada era sebelum perang disebut Hindia Belanda. Be-ban kesepakatan ini makin mem-beratkan beban Inggris pasca pe-ralihan tanggungjawab keseluru-han wilayah Indonesia pada Inggris.

Setelah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada Maret 1942, Belanda pada tanggal 8 April 1942 membentuk komisi yang disebut *Netherlands Indies Civil Affair* di Melbourne, Australia, un-tuk menangani urusan pemerintah pelarian Hindia Belanda¹³. Sebagai kepala NICA adalah H.J. Van Mook dan wakilnya adalah Van der Plas.

Pada tanggal 23 Desember 1943, Kerajaan Belanda mende-kritkan keberadaan susunan baru Pemerintah Hindia Belanda dengan pimpinannya Letnan Gubernur Jenderal H. J. Van Mook dan Van der Plas sebagai wakilnya. Nama *Netherlands Indies Civil Affair* pun diubah menjadi *Netherlands Indies Civil Administration*¹⁴.

Berkenaan dengan upaya pe-mulihan kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia bila perang telah berakhir, maka ketika wilayah ter-sebut masih terbagi dalam tang-gungjawab SEAC dan SWPC, Belanda telah melakukan kesepa-katan dengan dua komando Se-kutu di kawasan Asia-Pasifik ter-sebut. Khusus dengan pihak SEAC, pembicaraan mengenai ke-sepakatan tersebut telah dibica-rakan Van Mook dengan Laksamana Mountbatten sejak ta-hun 1944. Kesepakatan diformal-kan di London pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui perjanjian *Civil Affair Agreement*. Isi

pokok perjanjian tersebut antara lain menyebutkan:

- a) Pada tahap pertama, personil NICA berada di bawah penga-wasan dan tanggungjawab peme-rintah militer Sekutu di da-erah pendudukan;
- b) Van Mook sebagai kepala NICA bertanggung jawab pada pang-lima tertinggi SEAC;
- c) Secara berangsur-angsur wewe-nang dan tanggungjawab peme-rintahan di wilayah tersebut akan diberikan pada NICA¹⁵.

Pada awalnya perjanjian *Civil Affair Agreement* hanya berlaku pa-da wilayah Sumatera saja, karena belum terjadi pengalihan tanggung-jawab wilayah bekas - pendudukan Jepang dari SWPC ke SEAC. Belanda tidak diinformasikan ren-cana pengalihan itu¹⁶. Setelah terjadi pengalihan, pada tanggal 4 September 1945 dalam pertemuan di Kandy, Srilanka, Van Mook dan Laksamana Mountbatten sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pokok perjanjian *Civil Affair Agreement* pada wilayah Indonesia yang telah dialihkan pada SEAC oleh SWPC.

Hingga perkembangan saat itu, tampaknya Belanda tidak perlu mengkhawatirkan prospek upaya-nya untuk memulihkan pemerintah Hindia belanda di Indonesia. Na-mun keadaan ini berubah ketika pada periode berikutnya Laksamana Mountbatten mulai menerima informasi dari berbagai pihak mengenai situasi terakhir yang berkembang di Indonesia pas-ca Proklamasi Kemerdekaan.

¹³ Margaret George, *Australia dan Revolusi Indonesia*, (Jakarta, 1986), hlm. 51.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 55.

¹⁵ Donnison, *Op. Cit.* hlm. 416-418.

¹⁶ Louis Fischer, *The Story of Indonesia*, (New York, 1959), hlm. 81.

Reaksi Terhadap Revolusi Kemerdekaan Indonesia: Sikap Kontra Belanda dan Dilema Bagi Inggris

Ketika terjadi pengalihan wila-yah tanggungjawab di Indonesia dari SWPC, SEAC dijanjikan ban-tuan antara lain berupa informasi mengenai situasi politik terakhir di Indonesia, sarana transportasi, maupun pasukan, namun hal ini tidak terealisasi. Terutama yang ter-penting adalah informasi terakhir mengenai perkembangan di Indo-nesia. Sedangkan informasi yang datang dari Belanda terbukti kemu-dian sangat tidak memadai.

Pada tanggal 3 September 1945, van Mook menginformasikan pada Laksamana Mountbatten bahwa Republik Indonesia telah diproklamasikan antara tanggal 19-20 Agustus oleh Soekarno bersama dengan panglima militer Jepang¹⁷. Intelejen NICA pun turut menginformasikan bahwa diperkirakan ke-tika Belanda mendarat di Jawa ma-ka akan menghadapi perlawanan tidak efektif dari sekitar 40.000 hingga 45.000 pasukan republik¹⁸. Laporan-laporan tersebut tidak me-nyinggung hal lain, seperti per-kembangan politik terakhir di In-donesia antara lain semangat nasionalisme rakyat yang tengah bangkit yang kelak menjadi peng-halang utama Belanda¹⁹.

Laporan yang berbeda sampai pada Laksamana Mountbatten pada tanggal 28 September, berasal dari dua orang perwira Inggris yang per-nah ditahan Jepang di Indonesia, yaitu Letnan Kolonel Maisey dan *Wing Commander* Davis. Mereka

menjelaskan bahwa selama pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapat latihan ke-militeran dan janji kemerdekaan dari Jepang²⁰. Selanjutnya Let. Kol. Maisey pun mengemukakan opininya bahwa karena bangsa Indonesia sangat mendambakan kemerdekaan, maka setiap tawaran perundingan secara setengah hati dari Belanda akan memperburuk keadaan²¹. Semen-tara itu *Wing Commander* Davis menegaskan bahwa pendudukan Jepang telah membangkitkan sentimen nasionalisme penduduk setempat²². Baik Let. Kol. Maisey maupun *Wing Commander* Davis memiliki pendapat sama bahwa Van der Plas adalah tokoh yang sa-ngat dibenci Bangsa Indonesia.

Informasi lain diperoleh dari satu tim perwira Sekutu asal Inggris yang dipimpin Mayor A.G. Greenhalgh. Tim ini mendarat menggunakan parasut di lapangan udara Kemayoran tanggal 6 September, sebagai gugus tugas pendahuluan SEAC. Pokok-pokok laporan tim ini pada Laksamana Mountbatten adalah sebagai berikut:

a) Terdapat gerakan dengan kepemimpinan kaum nasionalis yang menyebarkan sikap anti Belanda maupun Jepang di kala-ngan rakyat. Kendati gerakan ini tampak kurang terorganisir, namun tampak ada upaya kepemimpinan kaum nasionalis untuk mengendalikan gerakan tersebut agar kemerdekaan yang telah diproklamirkan dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ingin memperlihatkan sikap bermusuhan pada Sekutu;

¹⁷ Oey Hong Lee, *Op. Cit.* hlm. 27.

¹⁸ Donnison, *Op. Cit.* hlm. 423.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Oey Hong Lee, *Op. Cit.* hlm. 28.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- b) Kondisi APWI yang membutuhkan bantuan secepatnya;
- c) Guna memperlancar tugas-tugas RAPWI, disarankan agar pendara-tan oleh Sekutu tidak mengi-kutsertakan Belanda karena kan menimbulkan permusuhan dari Bangsa Indonesia²³.

Laporan tim pimpinan Mayor Greenhalgh tersebut juga menyinggung sikap tentara Jepang. Sikap mereka, terutama setelah menrima perintah Sekutu untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, ternyata bervariasi. Ada para komandan tentara Jepang yang melaksanakan perintah Sekutu secara efektif; ada pula yang mengurung diri dalam markas mereka sambil menunggu kedatangan tentara Sekutu; bahkan ada pula secara sukarela menyerahkan senjata mereka pada rakyat Indonesia²⁴. Berdasarkan laporan ini, Laksamana Muda Patterson dari SEAC mengadakan pertemuan dengan Jenderal Moichiro Yamamoto, *Gunseikan* (kepala pemerintah militer Jepang) di Pulau Jawa, pada tanggal 15 September 1945. Dalam pertemuan tersebut Laksamana Muda Patterson menegaskan kembali agar tentara Jepang tetap memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, bila perlu dengan menggunakan kekuatan senjata²⁵. Pada pertemuan yang berlangsung di kapal penjelajah Inggris HMS Chumberland itu, Jenderal Yamamoto mengingatkan beberapa hal mengenai situasi khususnya di Pulau Jawa, di antaranya:

- a) Terdapat sentimen anti Belanda di kalangan penduduk lokal yang siap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kendati harus menumpahkan darah;
- b) Menyarankan Sekutu agar tidak mengganggu tokoh Soekarno dan Hatta, karena akan membuka konflik langsung dengan penduduk lokal;
- c) Agar bendera RI dibiarkan berkibar, dan dihindarinya pengibaran bendera Belanda guna menghindari kemarahan penduduk lokal²⁶.

Kendati memperoleh berbagai laporan yang menjadikan pelaksanaan komitmennya pada Belanda untuk memulihkan kekuasaannya di Indonesia menjadi sulit, namun Inggris pun mendapat tekanan dari Belanda. Ketika menerima penugasan sebagai perwakilan SEAC di Indonesia, Patterson telah diingatkan oleh Laksamana Mountbatten untuk tidak menekan maupun mengakui RI. Di tengah kondisi yang mulai dilematis bagi Inggris tersebut, pada tanggal 29 September 1945, mengumumkan pada pemerintah Indonesia bahwa Sekutu memiliki kewajiban menegakkan hukum dan ketertiban hingga pemerintah Hindia Belanda berfungsi kembali; dan demi maksud tersebut sebelum kedatangan pasukan Sekutu, untuk sementara digunakan tentara Jepang.

Situasi dilematis yang mulai tampak dihadapan Inggris di Indonesia akan mempersulit komitmen Inggris terhadap Belanda, bahkan bisa membahayakan misi utamanya untuk menangani penyerahan tentara Jepang

²³ Wehl, *Op. Cit.* hlm. 37-38.

²⁴ *Ibid.* hlm. 40.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Oey Hong Lee, *Op. Cit.* hlm. 26.

maupun penyelamatan tahanan perang Sekutu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berkenaan dengan situasi ini, sebenarnya Laksamana Mountbatten pada 28 September telah mengeluarkan perintah mengenai pembatasan misi Sekutu di Indonesia hanya dalam misi penanganan APWI dan perlucutan dan pemulangan tentara Jepang, serta menunda misi pemulihan pemerintah Hindia Belanda²⁷.

Hal yang memperkuat situasi dilematis Inggris sebagai motor kekuatan Sekutu di kawasan ini, adalah keterbatasan kekuatan militer yang dimiliki SEAC sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pendudukan militer pada wilayah Indonesia secara menyeluruh. Untuk itu pendudukan oleh SEAC hanya dilakukan pada daerah penting atau kunci saja: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Medan²⁸.

Dalam perkembangan pelaksanaan misi Sekutu di Indonesia, semakin jelas bahwa mereka tidak mungkin terhindar dari kerjasama dengan pemerintah RI. Terutama karena pasukan Jepang tidak dapat sepenuhnya melaksanakan tugas yang

dibebankan oleh Sekutu²⁹. Demikian halnya dengan realita bahwa sebagian besar aparatus pemerintahan dan sarana umum berada di tangan RI³⁰.

Sebagai solusi dilema yang saat itu dihadapi Inggris, maka di-upayakan menghindari konflik dengan pihak republik. Hal tersebut tercermin dalam siaran radio oleh AFNEI (Allied Forces of Netherland Indies), tanggal 29 September 1945, yang ditujukan pada pihak RI. Pengumuman radio yang ditandatangani oleh pimpinan AFNEI, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, berisi tentang tugas-tugas pokok AFNEI di Indonesia:

- a) Tugas utama AFNEI di Indonesia adalah memberi pertolongan ser-ta membantu pemulangan APWI; melucuti serta membantu pemulangan tentara Jepang ke negerinya, menegakkan hukum dan ketertiban demi dua tujuan di atas;
- b) Agar para pemimpin Indonesia menjaga ketertiban di luar daerah kunci yang diduduki tentara Inggris, serta tetap menjalankan pemerintahan sehari-hari;
- c) Pasukan Sekutu tidak bermaksud mencampuri urusan politik setempat. Namun mendorong agar baik RI maupun Belanda menyelesaikan pertentangan mereka melalui perundingan;
- d) Pimpinan AFNEI menghendaki agar pasukan Sekutu diperlakukan sebagai tamu oleh kedua pihak, dan meminta kedua pihak

²⁷ Donnison, *Op. Cit.* hlm. 426.

²⁸ Oey Hong Lee, *Op. Cit.* hlm. 31. daerah-daerah lainnya seperti Kalimantan dan kawasan Indonesia timur diserahkan pada pasukan Sekutu asal Australia dan Selandia Baru. Sementara itu Irian barat yang terlebih dahulu dibebaskan oleh SWPC telah diserahkan pada Belanda; Wehl, *Op. Cit.*, hlm. 43, dari jumlah enam divisi pasukan yang dibutuhkan SEAC dalam operasinya di Indonesia, yang tersedia hanya tiga divisi; Donnison, *Op. Cit.* hlm.426, bila dirinci, maka dari tigapuluh batalion pasukan Inggris yang dioperasikan SEAC hanya empat batalion yang berkebangsaan Inggris, selebihnya adalah pasukan Inggris yang berasal dari India.

²⁹ Bisheswar Prasad (ed.), *Post War Occupation Forces: Japan and Southeast Asia. Indian Armed Forces in World War II*, (Kanpur, 1958), hlm., 58.

³⁰ *Ibid.*

memenuhi distribusi kebutuhan pasukannya³¹,

Pengumuman atas nama Jenderal Christison tersebut mendapat protes keras dari Van Mook melalui telegram yang ia kirimkan pada Laksamana Mountbatten. Van Mook menuduh pengumuman radio tersebut sebagai pengakuan *de facto* terhadap keberadaan RI. Lebih lanjut Van Mook mengemukakan bahwa ia mendapat instruksi dari pemerintahnya agar tidak melakukan perundingan dengan pihak Indonesia sebelum kedaulatan Belanda atas Indonesia diakui, terlebih lagi para pemimpin Indonesia tersebut dianggap pernah bekerjasama dengan Jepang³². Se-roya itu, Van Mook pun mengingatkan Laksamana Mountbatten tentang kesepakatan Inggris-Belanda melalui perjanjian *Civil Affair Agreement*.

Sebagai tanggapan terhadap protes Van Mook tersebut, Laksamana Mountbatten mengingatkan Jenderal Christison supaya tidak mengesankan memberi pengakuan pada RI, tetapi ia membenarkan sikap untuk menghindarkan AFNEI dari keterlibatan politik di Indonesia³³. Sikap Laksamana Mountbatten mendapat dukungan dari Menteri Urusan Perang dari Inggris, J.J. Lawson, yang juga menegaskan bahwa bantuan Inggris bagi dua sekutunya di Asia Tenggara, Belanda dan Perancis, tidak termasuk tindakan memerangi rakyat setempat demi memulihkan kekuasaan kolonial baik di Indonesia maupun Indocina³⁴.

³¹ Wehl, *Op. Cit.*, hlm. 42; Prasad, *Op. Cit.*, hlm 224.

³² Oey Hong Lee, *Op. Cit.* hlm. 32.

³³ *Ibid.*

Sebagai reaksi terhadap peringatan atasannya, Jenderal Christison kembali berusaha meyakinkan bahwa penting bagi Inggris untuk mempertemukan pihak Belanda dan Indonesia dalam perundingan, karena tugas-tugas Sekutu di Indonesia membutuhkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif³⁵. Peringatan oleh Jenderal Christison tersebut disertai keluhannya tentang sikap NICA yang enggan memulai dialog, disampaikan oleh Laksamana Mountbatten kepada Kepala Staf Umum Inggris di London pada tanggal 5 Oktober³⁶.

Tekanan Inggris Terhadap Belanda Untuk Melakukan Perundingan Serta Sikap RI

Kementerian Luar Negeri Inggris mengutus salah seorang staf ahlinya yaitu Maberly E. Dening³⁷. Dalam penugasannya tersebut, Dening diangkat sebagai penasihat politik Laksamana Mountbatten. Laporan Dening yang kemudian disampaikan pada pemerintah Inggris, mendukung laporan sebelumnya oleh Laksamana Mountbatten, bahwa Inggris perlu menekan Belanda agar mau membuka dialog dengan bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada pengamatannya bahwa bangsa Indonesia tidak menghendaki kehadiran kembali Belanda, dan karenanya Belanda perlu bersikap lebih fleksibel, jika tidak akan timbul

³⁴ Prasad, *Op. Cit.*, hlm 224; Dorothy Woodman, *The Republic of Indonesia*, (London, 1956), hlm. 206-207

³⁵ Robert J. McMahon, *Colonialism and Cold War: the United States and the Struggle for Indonesian Independence 1945-1949*, (New York, 1981), hlm. 81.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* hlm. 92.

kekacauan dan pertum-pahan darah yang dikhawatirkan menyeret keterlibatan Inggris³⁸.

Perkembangan dari berbagai laporan yang sampai pada pe-merintah Inggris tersebut adalah tekanan oleh Parlemen Inggris pada Perdana Menteri Attlee, karena di-anggap kurang cukup tanggap da-lam menghadapi perubahan yang terjadi di Timur Jauh, khususnya yang berdampak pada keterlibatan Inggris³⁹. Enampuluh orang ang-gota Parlemen Inggris dari Partai Buruh kemudian menandatangani pernyataan yang isinya antara lain:

a) Agar Belanda maupun Perancis melakukan perundingan dengan pemerintah sementara Indonesia maupun Indocina, serta menerima tawaran bantuan mereka dalam penanganan tentara Jepang yang menyerah;

b) Mendesak supaya masalah politik yang terjadi pasca PD II pada kedua wilayah Timur Jauh ter-sebut segera didelegasikan pada PBB⁴⁰.

Tanggapan langsung pemerin-tah Inggris diberikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Ernest Bevin yang menyarankan agar Perdana Menteri Attlee menekan Belanda agar membuka perundingan dengan Indonesia, serta memperkecil ke-mungkinan penggunaan militer⁴¹.

Sementara itu realitas lapangan dan kesulitan yang dihadapi Inggris, mulai diakui NICA. Setelah per-temuan dengan Laksamana Mountbatten di

Singapura pada tanggal 10-11 Oktober, Van Mook menyampaikan pada pemerintahnya mengenai perlu adanya pembi-caraan dengan pihak Indonesia, hal ini dipandang penting antara lain juga guna mempertahankan duku-ngan Inggris.

Pada tanggal 16 Oktober di depan Parlemen Belanda, Logemann, Menteri Urusan Wilayah Seberang Lautan Belanda, me-ngemukakan kesediaan pemerintah untuk menawarkan pembicaraan dengan para pemimpin Indonesia mengenai masa depan Indonesia⁴². Namun ia mensyaratkan pembi-caraan mengenai hal tersebut harus berdasarkan pidato oleh Ratu Wilhelmina pada tanggal 6 Desember 1942⁴³. Ia menolak bila perundingan dengan pihak Indonesia mengikutsertakan Soekarno serta pemimpin Indonesia yang dianggap pernah bekerjasama dengan Jepang.

Mengenai syarat perundingan yang diajukan pemerintah Belanda tersebut, khususnya tentang hubu-ngan Belanda-Indonesia berdasar-kan pidato Ratu Wilhelmina terse-but, ditegaskan kembali oleh Van Mook⁴⁴. Secara garis besar, pidato ratu Belanda tersebut mengete-ngahkan rencana konferensi yang akan dihadiri para wakil wilayah Kerajaan Belanda, yaitu: Belanda, Indonesia, Curasao, Suriname guna membicarakan susunan kerajaan yang baru⁴⁵. Susunan kerajaan yang baru tersebut adalah ikatan persemakmuran

³⁸ McMahan, *Op. Cit.*, hlm. 92.

³⁹ Woodman, *Op. Cit.*, hlm. 210.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ McMahan, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁴² Alastair M. Taylor, *Indonesian Independence and the United Nation*, (London, 1960), hlm. 10-11.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ "Doctor Hatta's Statement about Van Mook's Clarification of the Dutch Policy toward Indonesia", *Voice of Free Indonesia*, I (Oktober, 1945), 10-11.

⁴⁵ *Ibid.*

dengan wilayah-wilayah yang tadi disebutkan sebagai bagiannya. Tiap bagian ke-rajaan akan memiliki kemerdekaan dalam menentukan urusan dalam negerinya, namun dengan diiringi kesediaan untuk saling membantu⁴⁶.

Pernyataan mengenai pidato Ratu Wilhelmina tersebut justru kembali membuntukan kemung-kinan dialog dengan pihak RI. Karena hal ini langsung mendapat reaksi keras dari Indonesia, seperti dikemukakan oleh Wakil Presiden RI Moh. Hatta pada tanggal 18 Oktober. Pernyataan oleh Hatta tersebut termuat dalam terbitan *Voice of Free Indonesia* bulan Oktober 1945. Menurut Hatta, Belanda tidak melihat perubahan yang terjadi pasca perang, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka secara penuh berdasarkan usaha-hanya sendiri⁴⁷. Menurut Hatta lagi, bangsa Indonesia tidak akan bersedia menerima status apa pun yang menempatkannya di bawah dominasi Belanda seperti pada masa sebelum perang, karena status politik Indonesia telah berubah begitu Belanda terusir

oleh Jepang dari Indonesia, dan setelah perang berakhir bangsa Indonesia telah menentukan nasibnya sendiri untuk merdeka. Hatta menyatakan deklarasi oleh Ratu Wilhelmina tersebut tidak lebih dari keinginan memulihkan kekuasaan Belanda atas Indonesia seperti masa sebelum perang⁴⁸.

Perbedaan sikap yang mendasar antara Indonesia dan Belanda tersebut memperkecil prospek perundingan. Terdesak oleh tengat waktu tugasnya di Indonesia, melalui Laksamana Mountbatten, Inggris makin kuat mendesak NICA agar bersedia berunding termasuk dengan tokoh Soekarno yang dianggap Belanda sebagai kolaborator Jepang. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober berlangsung pertemuan yang diselenggarakan militer Inggris, dengan dihadiri Van Mook dan para pimpinan RI termasuk Presiden Soekarno⁴⁹. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai penjajagan sikap masing-masing pihak, dan berlangsung di kediaman Jenderal Christison di Jakarta.

Pertemuan tersebut jelas mendapat kecaman keras oleh pemerintah Belanda, karena Van Mook dianggap melanggar ketentuan pemerintahannya yaitu untuk tidak melakukan pertemuan dengan pimpinan Indonesia yang dianggap sebagai kolaborator Jepang, termasuk Soekarno⁵⁰. Bahkan, sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mempertimbangkan untuk memecat

⁴⁶ P.S. Gerbrandy, *Indonesia*, (London, 1951), hlm., 194. kendati pidato oleh Ratu Wilhelmina ini ditujukan pada seluruh bagian kerajaan, namun jelas ditujukan terutama pada Indonesia yang saat itu berada dalam pendudukan Jepang. Terdapat beberapa bagian dari pidato atau deklarasi tersebut yang menekankan agar rakyat di Indonesia menolak propaganda Jepang mengenai janji-janji kemerdekaan di masa depan. Sebaliknya menyerukan agar rakyat setempat bekerjasama dengan wilayah kerajaan Belanda lainnya membina susunan baru kerajaan di masa depan. Dikemukakan pula dalam deklarasi tersebut, kecaman dan ancaman bagi mereka yang telah bekerjasama dengan Jepang. Pada saat pidato ini disampaikan, pemerintah Kerajaan Belanda berstatus pemerintahan pelarian di London, karena sejak bulan Mei 1940 Belanda dikuasai Jerman pada awal PD II.

⁴⁷ *Voice of Free Indonesia*, *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Oey Hong Lee, *Op. Cit.* hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid.*; J.J.P. de Jong, *Sjahrir dan H.J. Van Mook: Mitra dalam Perundingan*, (Jakarta, 1992), hlm. 76. salah satu motif Van Mook melakukan pertemuan dengan Soekarno tanpa persetujuan pemerintahannya adalah karena menganggap pemerintahannya terlalu lambat menanggapi perkembangan yang harus dihadapi NICA di Indonesia.

Van Mook dari kedudukannya sebagai pimpinan NICA. Kemudian rencana pemecatan Van Mook ini dicegah Ratu Wilhelmina, karena ia dianggap sebagai orang yang memahami situasi terakhir di Indonesia, dan kemampuannya dibutuhkan bagi kemungkinan perundingan dengan pihak Indonesia⁵¹. Kendati pemecatan tersebut dibatalkan, Van Mook mendapat peringatan keras dari pemerintahnya untuk tidak lagi melakukan pertemuan dengan Soekarno.

Dengan prospek perundingan Indonesia dan Belanda yang tetap tipis harapannya, Inggris terus mendorong kedua pihak untuk melakukan dialog. Upaya tersebut bukanlah indikasi adanya perubahan sikap Inggris dari komitmennya untuk membantu pemulihan otoritas Belanda di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Dening, penasihat politik Laksamana Mountbatten, pada para pimpinan RI termasuk Presiden Soekarno dalam pertemuan tanggal 23 Oktober 1945. Pada kesempatan tersebut, Dening juga menyarankan agar pihak Indonesia bersedia mempertimbangkan usul status dominion yang dikemukakan Belanda melalui pidato Ratu Wilhelmina, untuk mengawali perundingan dengan Belanda⁵². Kendati menyatakan kesediaan melakukan dengan Van Mook, Presiden Soekarno menolak usulan Dening tentang status dominion yang ditawarkan Belanda.

Sementara itu kesulitan Inggris di Indonesia semakin besar. Hal ini diakibatkan sikap Inggris untuk terus memfasilitasi kehadiran kembali Belanda di Indonesia menandai perlawanan dari rakyat Indonesia.

⁵¹ Oey Hong Lee, *Op. Cit.* hlm. 41.

⁵² *Ibid.*, hlm. 39.

Inggris mengikutsertakan personil NICA dalam tim-tim RAPWI (*Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees*) menimbulkan sikap permusuhan rakyat Indonesia terhadap pasukan Inggris. Hal ini menjerumuskan pasukan Inggris dalam berbagai konflik terbuka dengan rakyat Indonesia. Konflik meningkat terutama dalam bulan-bulan November dan Desember 1945. Pertempuran paling sengit dialami Inggris di P. Jawa, terutama di Surabaya, bahkan Inggris mengalami kekalahan di Ambarawa.

Inggris semakin mendesak Belanda agar mau membuka dialog dengan RI untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi pasukannya di Indonesia. Sementara itu desakan agar pihak-pihak yang bertikai beres-beres menembus pembicaraan juga datang dari Amerika Serikat. Seruan oleh pemerintah Amerika tersebut dikemukakan pada tanggal 19 Desember 1945, juga mendesak Belanda agar mengajukan konsesi-konsesi agar perundingan dapat berlangsung⁵³. Terhadap seruan Amerika Serikat ini, Belanda merasa sulit untuk mengabaikannya karena pasca perang sangat membutuhkan bantuan ekonomi Amerika Serikat.

Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1945 di Chequers, tempat peristirahatan Perdana Menteri Inggris, berlangsung pertemuan antara perwakilan pemerintah Inggris dan Belanda. Dalam pertemuan ini Inggris diwakili oleh Perdana Menteri Attlee,

⁵³ McMahon, *Op. Cit.*, hlm. 103, 114. kendati tidak ada kepentingan langsung Amerika Serikat terhadap konflik tersebut, namun Amerika tidak ingin konflik tersebut berlarut menjadi krisis internasional yang melibatkan persaingan baru pasca PD II terhadap kelompok negara-negara Blok Timur pimpinan Uni Soviet.

Menteri Luar Negeri P.J. Noel Baker, Kepala Staf Angkatan Perang Sir Alan Brooke; sedangkan pihak Belanda diwakili Perdana Menteri Schermerhorn, Menteri Urusan Wilayah Seberang Lautan Logemann, Menteri Luar Negeri J.H. Van Roijen, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.J. Van Mook, dan Duta Besar Belanda untuk Inggris Michiels Van Verduynen⁵⁴. Pada pertemuan tersebut Belanda mengemukakan kesediaannya berunding dengan pemerintah RI. Inggris pun menyatakan akan menengahi perundingan RI dan Belanda, dan merencanakan mengutus seorang diplomat kawakan sebagai penengah dan konsultan bagi kedua pihak. Diplomat Inggris tersebut adalah Sir Archibald Clark Kerr, mantan Duta Besar Inggris untuk Uni Soviet⁵⁵. Ia tiba di Indonesia tanggal 1 Februari 1946.

Di lain pihak, konsesi yang dilakukan Indonesia dan tidak dapat diabaikan oleh Belanda, adalah perubahan kabinet pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer dengan diangkatnya Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri pada tanggal 14 November 1945. Salah satu motif utama perubahan ini bagi Indonesia adalah peluang perundingan dengan Belanda yang melibatkan pihak ketiga atau internasional, karena hal ini akan semakin membuka prospek pengakuan kedaulatan RI oleh dunia. Hal ini tercermin antara lain dari Wakil Presiden Moh. Hatta yang menyatakan bahwa pendelegasian pemerintahan pada Sjahrir akan memperkuat posisi

RI dalam strategi diplomasi dan mempermudah untuk membuka jalan perundingan yang tengah dirintis⁵⁶.

Terbukanya kembali prospek perundingan antara RI dan Belanda menjadi landasan bagi pertarungan diplomasi pada periode selanjutnya: perundingan di Hoge Veluwe (1946), Perundingan Linggarjati (1947), Perundingan Renville (1948), Konferensi Meja Bundar (1949). Perjuangan diplomasi RI yang ditutup oleh pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda ini, diawali kemampuan RI memanfaatkan situasi internasional pasca PD II. Berakhirnya PD II, selain merupakan kemenangan bagi Sekutu, juga memperlihatkan kemunduran kekuatan kolonial lama. Bahkan kekuatan kolonial yang berasal dari Sekutu sekalipun tidak mampu menahan perubahan akibat perang di daerah koloni mereka di Asia (maupun Afrika). Seperti dialami Inggris dan Belanda, yang pada akhirnya mengakui *de facto* keberadaan RI karena harus berhadapan sebagai mitra perundingan yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel :

“Doctor Hatta’s Statement about Van Mook’s Clarification of the Dutch Policy toward Indonesia”, *Voice of Free Indonesia*, I (Oktober, 1945), 10-11.

Kartodirdjo, Sartono. “Wajah Revolusi Indonesia dipandang dari Prespektif Struktural”, *Prisma*, 8 (Agustus, 1981), 3-13.

⁵⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*, (Paris, 1973), hlm., 16-17.

⁵⁵ Agung. *Op. Cit.* hlm., 19.

⁵⁶ Panitia Penulisan Sejarah Departemen LN RI, *Duapuluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri RI 1945-1970*, (Jakarta, 1971), hlm., 172.

Buku:

Agung, Ide Anak Agung Gde. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris: Mouton and Co., 1973.

Donnison, P.S.V. *British Military Administration in the Far East 1945-1946*, London: T. P., 1956

George, Margaret. *Australia dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: P.T. Pantja Simpati, 1986.

Gerbrandy, P.S. *Indonesia*. London: Hutchinson & Co Ltd., 1951.

Jong, J.J.P. de. *Sjahrir dan H.J. Van Mook: Mitra dalam Perundingan*, Jakarta: T. P., 1992.

Leifer, Michael. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Fischer, Louis. *The Story of Indonesia*. New York: T. P., 1959.

McMahon, Robert J. *Colonialism and Cold War: the United States and the Struggle for Indonesian Independence 1945-1949*. New York: Cornell University Press, 1981.

Oey Hong Lee. *War and Diplomacy in Indonesia 1945-1950*. North Queensland: James Cook University Press, 1981.

Prasad, Bisheswar (ed.), *Post War Occupation Forces: Japan and Southeast Asia. Indian Armed Forces in World War II*. Kanpur: T. P., 1958.

Roy, S.L. *Diplomasi*. Jakarta: Grafitti, 1991.

Taylor, Alastair M. *Indonesian Independence and the United Nation*. London: Stevens and Sons Ltd., 1960.

Wehl, David. *The Birth of Indonesia*.
London: George Allen and Unwin
Ltd., 1948.

Woodman Dorothy. *The Republic of Indonesia*. London: The Crescent Press, 1956.